

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK
HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau



Beggi Padista

NPM: 177110647

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan jajaran Dosen pada jurusan Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik dan sekaligus Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini terhadap apa yang telah di arahkan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang penulis persembahkan kepada ayahanda Awaludin, Ibunda Yanti Apriliani yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Teman - teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik terutama kelas Administrasi Publik B yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin YaRab...

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.



Pekanbaru, 30 November 2021
Penulis,

Beggi Padista

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	26
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	28
A. Studi Kepustakaan	28
1. Konsep Administrasi.....	28
2. Konsep Organisasi	33
3. Konsep Manajemen.....	38
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	42
5. Konsep Pelaksanaan.....	47
6. Konsep Kepemimpinan.....	51
7. Konsep Pembinaan.....	55
B. Kerangka Pikir	64
C. Konsep Operasional.....	65
D. Operasionalisasi Variabel	67
E. Teknik Pengukuran	68
BAB III: METODE PENELITIAN.....	70
A. Tipe Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Populasi dan Sampel	71
D. Teknik Penarikan Sampel	74
E. Jenis dan Sumber Data.....	74
F. Teknik Pengumpulan Data.....	75
G. Teknik Analisis Data	76
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	77

BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	78
A. Sejarah Ringkas (Lembaga Tempat Penelitian)	78
B. Struktur Organisasi	85
C. Fungsi Dan Tugas Organisasi	86
D. Sumber Daya Organisasi	90
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A. Identitas Responden	92
B. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	95
C. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	117
BAB VI : PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR KEPUSTAKAAN	122
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Nama dan Jumlah Dusun Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	6
I.2 : Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	7
I.3 : Program Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 2020.....	20
I.4 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Kubang Jaya Tahun Anggaran 2020.....	22
I.5 : Jenis Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Dalam APBDes Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 2015/2020.....	23
II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	67
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	72
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	77
VI.1 : Jumlah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	82
VI.2 : Daftar Sumber Daya Organisasi Pemerintah Desa Kubang Jaya.....	91
V.1 : Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	92
V.2 : Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin	93
V.3 : Identitas Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan	94
V.4 : Identitas Responden berdasarkan Tingkat Umur	94

V.5	: Tanggapan Responden Pemerintah Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Penyuluhan	97
V.6	: Tanggapan Responden Masyarakat Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Peyuluhan	99
V.7	: Tanggapan Responden Pemerintah Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Pengarahan.....	104
V.8	: Tanggapan Responden Masyarakat Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Pengarahan.....	106
V.9	: Tanggapan Responden Pemerintah Desa Kubang Jaya Mengenai Indikaroe Bimbingan.....	109
V.10	: Tanggapan Responden Masyarakat Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Bimbingan	111
V.11	: Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	64
VI.1	: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	125
2. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) Kepada Pemerintah Desa Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	127
3. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) Kepada Masyarakat Desa Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	132
4. Foto Dokumentasi Observasi Langsung Peneliti Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	137
5. Table Rekapitulasi Telly Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	142
6. SK Dekan Fisipol UIR/ No. Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulis Skripsi a/n Beggi Padista.....	145
7. Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik No.2249/E-UIR/27-FS/2021 Tentang Permohonan Rekomendasi Riset.....	146
8. Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No.503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42292.....	147
9. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Kampar Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik No.070/BKBP/2021/538.....	148
10. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Siak Hulu No.070/BKBP/2021/538.....	149
11. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Kampar Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar No.140/KJ/IX/2021/135.....	150

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beggi Padista
NPM : 177110647
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Sripsi : Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan
Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2021

Pelaku Pernyataan,



Beggi Padista

**PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK
HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

BEGGI PADISTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Indikator penilaian pembinaan kemasyarakatan yang dipergunakan meliputi penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pelaksanaan dari fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang menggunakan teknik survei deskriptif yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel yaitu perangkat desa dan masyarakat, besaran sampel dari kedua kelompok adalah 21 dan 44 orang, teknik yang digunakan penulis dalam menentukan individu sampel dalam kelompok pertama menggunakan teknik sensus terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kasi Desa, Ketua BPD, serta RT dan RW. Selanjutnya pada sampel kedua menggunakan teknik purposive sampling yaitu terdiri dari sejumlah kepala keluarga. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada interval Cukup Terlaksana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi, Pembinaan Kemasyarakatan

**IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE VILLAGE HEAD IN
COMMUNITY DEVELOPMENT IN KUBANG JAYA VILLAGE, SIAK HULU
DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

BEGGI PADISTA

This study aims to determine how the implementation of the function of the Village Head in community development in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. Community development assessment indicators used include counseling, direction, and guidance. This type of research is located in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The purpose of the study was to analyze and determine the implementation of the function of the Village Head in community development and to find out the obstacles to the implementation of the function of the Village Head in community development. The method used is a quantitative method that uses a descriptive survey technique, namely prioritizing a list of questionnaires as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions from the objectivity of the existence of research objectives at precise locations. There are two groups of population and samples, namely village officials and community, the sample sizes from the two groups are 21 and 44 people, the technique used by the author in determining the individual sample in the first group uses a census technique consisting of the Village Secretary, Village Head, Village Head, Head of BPD, as well as RT and RW. Furthermore, in the second sample using a purposive sampling technique, which consists of a number of heads of families. Types and sources of data using primary data and secondary data. Data collection techniques using a list of questionnaires, interviews, observation and documentation. While the data analysis technique used descriptive analysis techniques. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Implementation of the Function of the Village Head in Community Development in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency at intervals was Sufficiently Implemented.

Keywords: Implementation, Function, Community Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Siagian (2006;2) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang/ lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Organisasi menurut Siagian (2003;6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan yang didalamnya terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Apapun bentuk organisasi itu diperlukan usaha-usaha untuk mengelola kegiatan dan orang-orang maupun unsur lainnya yang ada didalam organisasi agar tercapai tujuan dengan lebih baik.

Agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih baik dan mudah maka di dalam menjalankan sebuah organisasi dibutuhkan manajemen. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Manajemen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat/ sarana yang tersedia semaksimal mungkin, manajemen merupakan suatu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan.

Menurut Zulkifli (2005;28) bahwasannya manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah diterapkan.

Menurut Terry (2012;5) mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktifitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktifitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu tidak ada sebuah organisasi yang tidak menggunakan manajemen yang baik. (dalam Torang, 2013;165)

Adapun dari keseluruhan rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek manajemen,

sedangkan fungsi actuating (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Horn mengatakan bahwasannya pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (dalam Agustino,2012;139)

Arti penting dari pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi tersebut.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, sehingga tidak memungkinkan segala sesuatu diatur oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan-kewenangan tertentu oleh Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di Daerah masing-masing.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah sebagai bagian internal dari Negara Kesatuan yang di atur melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Peraturan Daerah yang diatur Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom (Pasal 1 ayat 3 UU No 23 Tahun 2014).

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.289,28 km² dengan jumlah penduduk 851.837 jiwa. Memiliki 21 kecamatan terdiri dari 8 kelurahan dan 250 desa. Dari 21 kecamatan salah satunya yaitu Kecamatan Siak Hulu. Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 12 Desa.

Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Siak Hulu yang merupakan bagian dari Kabupaten Kampar. Luas wilayah Desa Kubang Jaya sekitar 16.380 km² . Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Pekanbaru dari sebelah Utara. Desa Kubang Jaya salah satu alternative bagi penduduk Kotamadya Pekanbaru dan penduduk pendatang yang ingin mendapatkan hunian

murah tetapi dekat dengan pusat kota dan fasilitas umum yang ada di Kotamadya Pekanbaru.

Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah Pemerintahan Desa Teratak Buluh. Desa Kubang Jaya salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang di kepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa Kubang Jaya terbagi menjadi 4 wilayah dengan Nama Dusun yaitu :

Tabel I.1 : Nama dan Jumlah Dusun Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Dusun	Nama Dusun
1.	I	Sialang Indah
2.	II	Keramat Sakti
3.	III	Bencah Pudu Permai
4.	IV	Kasang Kulim

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya 2020

Dari uraian diatas Desa Kubang Jaya terbagi menjadi 4 Dusun, kemudian dari 4 Dusun ini masing - masingnya memiliki beberapa Ketua RW dan RT yaitu :

- Dusun I Sialang Indah : Ketua RW 2 dan Ketua RT 8
- Dusun II Keramat Sakti : Ketua RW 4 dan Ketua RT 18
- Dusun III Bencah Pudu Permai : Ketua RW 3 dan Ketua RT 10
- Dusun IV Kasang Kulim : Ketua RW 4 dan Ketua RT 20

Kemudian menurut Catatan Desa Kubang Jaya. Jumlah penduduk Desa Kubang Jaya adalah 36.731 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 9.058 KK. Agar lebih jelas dapat dilihat pada data tabel dibawah ini :

Tabel I.2 : Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki – laki	17.682
2.	Perempuan	19.049
Jumlah		36.731

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya 2020

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:

- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Selanjutnya dalam peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Salah satu unsur dari pemerintahan desa adalah Kepala Desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, fungsi dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kemudian Tugas dan Fungsi Kepala Desa telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) dan (3) tentang Desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintah, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
 - Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Segala Tugas dan Fungsi Kepala Desa telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, baik dalam pelayanan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala Desa itu sendiri yang merupakan kepala pemerintahan di desa yang didampingi oleh sekretaris desa dalam urusan pemerintahan desa.

Unit satuan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini adalah pemerintahan desa, yang dalam masa perkembangannya pada saat ini merupakan ujung tombak kunci dari pelayanan pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai instansi vertikal dari pemerintah pusat, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam menjalankan pemerintahan di ruang lingkup administratifnya dan juga dalam pengelolaan proses sosial serta pembinaan di masyarakat desa tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, menurut Moch Solekhan (2012) tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah bagaimana agar menciptakan kehidupan desa yang demokratis, dan memberikan pelayanan publik yang baik sehingga dapat membawa masyarakat desa pada kehidupan yang sejahtera, tentram, adil dan aman.

Desa adalah wilayah atau pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/ dusun/ banjar/ jorong.

Berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa yaitu Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa, terdiri atas sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, pelaksanaan teknis.

Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat (2) dan (3) tentang SOTK Pemerintah Desa yaitu:

- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja Pemerintahan, menetapkan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Kepala Desa mempunyai Fungsi dalam Pembinaan Kemasyarakatan.

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan yang diharapkan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat desa ialah bentuk upaya dari pemerintah desanya dalam upaya mengarahkan masyarakatnya kepada kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Arti penting pembinaan yaitu pembinaan sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu

dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan Kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan.

Adapun hak dan kewajiban masyarakat desa terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) dan (2) tentang Desa, yaitu:

- 1) Masyarakat Desa Berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi:

- 1) Kepala Desa;
 - 2) Perangkat Desa;
 - 3) Anggot Permusyawaratan Desa;
 - 4) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa.
- 2) Masyakat Desa Berkewajiban;
- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan
 - e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan didesa.

Upaya pemerintah dalam pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat 1 dan 2 tentang Desa, yaitu :

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.
- 2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berikut ini Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagai berikut :

Tabel I.3 : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dari latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa peranan Kepala Desa sangat penting bagi masyarakat desa dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Kubang Jaya dalam hal ini kepala desa bekerja sama dengan perangkat desa serta dinas kesehatan, dinas pendidikan, maupun kepolisian dan orang atau badan yang dianggap perlu untuk membantu memberikan pembinaan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang penulis jumpai dilapangan, hal ini berdasarkan observasi dan sekaligus wawancara dengan salah satu aparat Pemerintah Desa, terdapat gejala-gejala atau fenomena sehubungan dengan Fungsi Kepala Desa dalam Pembinaan Kemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan yang dilakukan kepala desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam bidang kebudayaan & keagamaan, salah satu kegiatannya yaitu upacara agama & pesta budaya banyak kegiatan yang belum terlaksana. Padahal kegiatan tersebut sangat penting diterapkan dan diperlihatkan kepada generasi muda yang akan datang untuk meningkatkan, melestarikan, menghayati tradisi budaya dan kesenian keagamaan yang ada dalam masyarakat.
2. Tidak adanya dukungan dan motivasi yang diberikan pemerintah desa khususnya kepala desa kepada generasi muda yang memiliki banyak prestasi di dunia olahraga. Salah satu kegiatan yang ada dalam bidang kepemudaan & olahraga adalah lomba festival kepemudaan dan olahraga sama sekali belum pernah terlaksana. Akibatnya banyak generasi muda yang tidak dapat menyalurkan dan mengembangkan bakatnya. Padahal kegiatan ini diadakan

untuk membangun para generasi muda agar dapat berpartisipasi dalam kemajuan desa.

3. Belum terlaksana pembangunan pos ronda dilingkungan masyarakat dan tidak adanya kegiatan poskamling yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya pengarahan dan pengawasan yang diberikan Kepala Desa kepada RT, RW maupun masyarakat desa. Akibatnya masyarakat lengah dan merasa tidak memiliki tanggung jawab padahal kegiatan poskamling ini diadakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa aman, tenang dan nyaman berada dilingkungannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh. Dengan judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sumbangsih dalam bentuk laporan penelitian dibidang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh instansi maupun pegawai terkait atau yang berkepentingan sebagai bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi yaitu Proses Didalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, juga dapat dijadikan bahan informasi bagi penulis berikutnya yang meneliti permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administratio yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut *amministrazione*, sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut *administration*. (dalam Syafri, 2012;3)

Menurut Herbert A. Simonn (dalam Syafri, 2012;8) administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Kemudian Prajudi Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2006;13) mengatakan bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi itu berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafiie, 2003;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Silalah (dalam Zulkifli, 2005;20) administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kemudian menurut E.N Gladden (dalam Syafri, 2012;10) mengatakan administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya manusia dan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki

Menurut Syafri (2012;11) administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafri, 2012;14) administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajeme (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatahubungan)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalialia (tatapegawaian)
6. Finansial (tatakeuangan)

7. Material (tatapembekalan)

8. Relasi Publik (tatahumas)

Ragam pengertian untuk menerangkan lingkungan konsep administrasi menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2014;11)

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha da sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai bahan adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa-apa yang menjadi maksud (pupose) dan tujuan-tujuan (goals), usahanya, sumber pendanaannya, serta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian tujuan.
- c. Didalam organisasi setiap organisasi dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
- d. Administrator bisa perorangan dan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Para administrator harus mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Hendaknya disadari oleh para administrator bahwa kegiatan apapun bertujuan untuk menegakkan kebenaran, kebaikan serta keindahan. Walaupun dirinya semula hanya rakyat biasa (infrastuktur politik) kemudian menjadi pemerintah (suprastruktur politik). (dalam Syafiie, 2003;8)

Proses yang mendasar bagi administrasi yang dilakukan oleh seorang administrator adalah menggunakan nalar, yaitu berpikir rasional yang ditunjang dengan fakta dan data yang ada dilapangan. Dengan demikian seorang administrator dalam melakukan aktivitas administrasinya dapat melalui berbagai tahapan, misalnya: merencanakan, mengorganisir, mengatur berbagai sumber, memberikan arahan kepada para pegawai, serta melakukan pengawasan baik secara melekat maupun fungsional dan mengevaluasi seluruh aktivitas. (dalam Haryono, 2012;6)

Menurut L. Urwick dan L. Gullick (1937) (dalam Haryono, 2012;6) menegaskan bahwa fungsi administrasi meliputi: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting (POSDCORB).

Kemudian menurut Adam (dalam Syafri, 2012;8) administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Menurut Silalah (dalam Zulkifli, 2009;10) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi,waktu dan tempat dimana dia dijalankan.

2. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; adanya pertimbangan rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut.
3. Bahwa administrasi sebagai sesuatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah dan dijalankan semenjak manusia mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simonn (dalam Zulkifli, 2009;11) yaitu apabila ada dua orang bekerja bersama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat di gulingkan hanya oleh seseorang diantara mereka, pada saat itu lah administrasi telah ada.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Syafiie, 2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan penulis Administrasi adalah proses kerja sama seluruh warga atau sekelompok manusia yang saling bekerja sama guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Memandang organisasi sebagai suatu organisme yang dinamis berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi dari pada organisasi ialah sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada didalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Organisasi adalah system peran, aliran aktifitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang di desain untuk mencapai tujuan bersama. (dalam Torang,2013;25)

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (dalam Sofyandi, 2007;3) adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2006;52) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Sedangkan Chester Barnard (dalam Miftah Thoha, 2008;167) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih. Dengan demikian Bernard menyumbangkan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekayaan (property) suatu organisasi, antara lain:

1. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran.
2. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang bersasaran tersebut.
3. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian dalam perencanaan tujuan bersama dengan anggota-anggota lainnya. Dalam hal ini Bernard menekankan peranan seseorang dalam organisasi, diantaranya ada sebagian anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi, dan sebagian lainnya yang harus membuat keputusan.

Blake dan Mounon (dalam Miftah Thoha, 2008;168) mencoba menjelaskan pengertian organisasi dengan mengenalkan adanya tujuh unsur yang melekat pada organisasi. Ketujuh unsur tersebut antara lain:

1. Organisasi senantiasa mempunyai tujuan.
2. Organisasi mempunyai kerangka (structure).

3. Organisasi mempunyai sumber keuangan.
4. Organisasi mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan tersebut (know-how).
5. Didalam organisasi terdapat proses interaksi hubungan kerja antara orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan tersebut.
6. Organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya.
7. Organisasi mempunyai hasil-hasil yang ingin dicapainya.

Menurut Syafri (2012;12) mengemukakan organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Menurut pandangan Max Weber (dalam Syafiie, 2006;53), organisasi itu tetap merupakan sebagai suatu lingkaran masyarakat yang harus membiasakan dirinya untuk patuh kepada perintah-perintah pemimpinnya, dimana masing-masing mempunyai perhatian pribadi secara berkesinambungan dalam pengaturan kebijaksanaan, sebagai partisipasi mereka bersama dan hasil yang bermanfaat, dapat dilakukan pembagian pelatihan kerja dan fungsi (tugas) mereka masing-masing. Dengan demikian pada gilirannya akan dipersiapkan untuk kemandirian mereka sendiri.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005;25) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan

dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Organisasi sifatnya persial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (persial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, di mana yang *pertama* terdiri dari manusia/ tenaga, waktu, materi/ bahan/ alat, sasaran dan tujuan, sedangkan yang *kedua* terdiri dari proses, program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu, dan evaluasi. (dalam Faried Ali, 2011;27)

Organisasi merupakan wujud conscience collective (hati nurani kolektif) yang termanifestasikan pada bentuk setia kawan. Dimaksudkan bahwa dalam suatu institusi, bentuk setia kawan harus dimunculkan-aktifkan melalui keragaman cara berpikir, kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan proyeksi ke depan, merasa memiliki di dalam tanggung jawab bersama, menghindari protes melalui sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan cara menampung, dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah, memecahkan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan timbul, menghindari preseden dan mencegah curiga mencurigai dan seterusnya. (dalam Faried Ali, 2011;28)

Adapun definisi menurut Zulkifli (2009;38) menyatakan bahwa organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama sejumlah personil, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjuk staf, pendegelasan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Massien (dalam Zulkifli, 2009;78) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugas diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

Organisasi menurut Atmosudirdjo (dalam Hasibuan, 2006;121) adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya menurut Nawawi (2008;13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah:

1. Manusia, yaitu: yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu: manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu: kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu: organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat

kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan kesimpulan penulis Organisasi adalah suatu wadah/ tempat yang terdiri dari unsur manusia atau sekelompok orang yang saling bekerjasama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, maka tentu memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi tersebut, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen.

Menurut Zulkifli (2005;28) bahwasannya manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah diterapkan.

Menurut Liang Gie (dalam Zulkifli, 2009;16) manajemen adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2009;17) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Sedangkan menurut Siagian (2005;5) memberikan batasan mengenai manajemen adalah suatu proses atau kelompok kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Atau dengan kata lain manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaan disebut manajer atau pengelola.

Manajemen secara fungsional adalah merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing) yang didalamnya terdapat penetapan struktur organisasi, pengisian orang-orang yang akan mengisi struktur tersebut yang selanjutnya dikenal dengan staffing, pelaksanaan (actuating) yang pelaksanaan atas sesuatu yang telah direncanakan dan diorganisasikan, pengawasan (controlling), yakni melakukan tindakan yang diarahkan pada upaya mengawasi secara cermat dan seksama terhadap berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap sesuatu yang telah direncanakan, penilaian (evaluating) yakni menilai segala sesuatu yang telah direncanakan dan dikerjakan, dan pembinaan atau perbaikan (supervising) agar sesuatu itu dapat mencapai hasil yang maksimal. (dalam Abuddin Nata, 2003;359)

Wirman Syafri (2012;12) mengatakan bahwa manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi

dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli dan Yogia, 2014;17)

Menurut Terry (2012;5) mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang penggunaanya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

L. G. Longenecker (dalam Nawawi, 2013;11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan.

Sedangkan menurut Kast & Rosenzweig (dalam Nawawi, 2013;11) mengartikan manajemen merupakan kegiatan yang meliputi koordinasi orang-orang dan koordinasi sumber-sumber material untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu Henry L. Sisk (dalam Nawawi, 2013;11) mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan dan keterampilan agar aktifitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu

tidak ada sebuah organisasi yang tidak menggunakan manajemen yang baik. (dalam Torang,2013;165)

Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain. (dalam Winardi,2009;3)

Jika disederhanakan manajemen sebagai suatu proses itu melihat bagaimana cara orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan seterusnya kembali pada kegiatan awal berupa perencanaan sebagai sesuatu yang kontinum.

Menurut Hasibuan (2002;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: Man, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.

Melalui proses ini para pemimpin (manajer) menggunakan semua sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini keberadaan orang (sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi, maka dari itu para pemimpin (manajer) tidak

akan dapat mencapai tujuan secara optimal apabila mereka mengabaikan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013;14) manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin.

Berdasarkan kesimpulan penulis Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sumber Daya Non-Manusia.

Menurut Samsudin (2010;22) manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Manajemen merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan dari pada penguasaan, karyawan dan juga masyarakat.

Kemudian menurut Amirullah (2004;206) mengemukakan manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya Hasibuan (2012;7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain yaitu:

- Man : Man dalam organisasi publik di artikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- Money : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
- Material (bahan-bahan perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.

- Machines (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- Methode (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan itu tergantung pada cara pelaksanaannya, dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerja.
- Market : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangan unsur Man (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu man (manusia). Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Selanjutnya Martoyo (2000; 25) yang mengatakan bahwa aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Suwanto & Donni (2014;16) mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Selanjutnya menurut Handoko (2003;4) manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kiggundu mengenai manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sarana-sarana dan tujuan-tujuan, individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. (dalam Fautisno, 2003;4)

Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi (dalam Fautisno, 2003;4) antara lain:

1. Rancangan Organisasi
2. Staffing
3. Sistem Reward
4. Manajemen Performansi
5. Pengembangan Pekerja dan Organisasi
6. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Menurut Nawawi (2008;41) menyebutkan bahwa ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) didalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Pengertian ini mencakup dari mulai memilih siapa yang memiliki kualitas dan pantas untuk menempati posisi dalam perusahaan (the right man and the right place) seperti yang diisyaratkan oleh perusahaan sehingga bagaimana agar kualifikasi ini dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. (Ernie dkk, 2009;194)

Berdasarkan kesimpulan penulis Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk mengatur orang atau karyawan, dengan mengembangkan potensi manusia dan organisasinya, untuk melakukan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, terhadap pengadaan, pemeliharaan, sampai pemberhentian sebagai upaya-upaya untuk mengembangkan aktivitas manusia dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. ,

5. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksanaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan pengertian pelaksana ialah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Adapun dari keseluruhan rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek manajemen, sedangkan fungsi actuating (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Menurut Wahab (2001;65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan yang terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Smith didalam suatu proses implementasi (pelaksanaan) ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (Tensions) yang bisa menyebabkan timbul institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut (dalam Tachjan, 2006;37). Keempat variabel tersebut yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan

2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksanaan
4. Faktor lingkungan

Pelaksanaan adalah sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (dalam Budi Winarno, 2008;147)

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. (dalam Ardisasmita, 2011;24)

Syaukani (2002;295) mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan ialah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan tersebut, dan ketiga adalah bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah dikemukakan Siagian (2006;126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Kemudian menurut Terry (dalam Syafie, 2006;81) mengatakan bahwa pelaksanaan kerja merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dari usaha-usaha organisasi.

Menurut Harsono (2001;65) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam suatu penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir.

Horn mengatakan bahwasannya pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (dalam Agustino,2012;139)

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintaro (2000;14) perlu memperhatikan beberapa hal lain:

- a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
- b. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- c. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
- d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Berdasarkan kesimpulan penulis Pelaksanaan adalah suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang, selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara

pelaksanaan berhasil atau tidaknya dalam mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan.

6. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti perintah yang diberikannya untuk melaksanakan tugas-tugas dan program yang direncanakan guna mencapai tujuan yang diharapkan. (dalam Abuddin, 2003;366)

Kepemimpinan tak ubahnya sebagai dinding atau pilar tempat sandaran sesuatu, sedangkan manajer adalah tangga untuk mencapai tujuan. Jika kepemimpinan banyak menggunakan akal kanan yang bersifat ideal, terobosan dan melampaui batas-batas waktu, dan dapat melakukan perubahan dan mengambil kebijakan, maka manajer banyak menggunakan akal kiri yang bersifat teknis, linear dan mengarah pada hal-hal yang bersifat teknis.

Seorang pimpinan dapat menjadi manajer, sedangkan seorang manajer belum tentu dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan. Pimpinan lebih terkait dengan kesanggupan memikul beban yang diamanatkan, sedangkan manajer terkait dengan kemampuan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis. (dalam Abuddin, 2003;367)

Menurut Siagian (dalam Sutrisno Edy,2015;214) mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain,

dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melaksanakan kehendak pemimpin, meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya.

Blanchard dan Hersey (dalam Sutrisno Edy, 2015;214) mengatakan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu dalam kelompok dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu.

Menurut Robbins (dalam Wibowo, 2014;264) kepemimpinan sebagai kemampuan suatu kelompok menuju pada pencapaian tujuan. Sumber dari pengaruh mungkin bersifat formal, seperti yang diberikan pada jabatan manajerial dalam organisasi.

Greenberg dan Baron (dalam Wibowo, 2014;264) memberikan definisi kepemimpinan sebagai proses dimana satu individu mempengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasi yang didefinisikan. Sedangkan pemimpin adalah individu dalam kelompok atau organisasi yang paling berpengaruh terhadap orang lain.

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan pada anggota kelompok. (dalam Rivai, 2013;2). Konsep kepemimpinan erat hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. (dalam Rivai, 2013;3)

Seiring dengan tugas utamanya mengarahkan, menggerakkan, membimbing dan menginspirasi para karyawan dan staff yang berada dalam sebuah perusahaan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan perkembangan zaman, maka seorang pimpinan diharuskan memiliki persyaratan kualitatif sebagai berikut:

1. Technical skill, yakni kemampuan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis, seperti menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan interaksi.
2. Leadership skill, yakni kemampuan mengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan sumber tenaga kerja, agar mau bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan.
3. Emotional skill, yakni kemampuan mengelola dan mengendalikan emosinya agar menjadi sesuatu yang positif.
4. Communication skill, yakni kemampuan membangun hubungan dan kerjasama dengan oranglain, atas dasar saling membantu, tolong-menolong, toleransi dan saling menghargai.
5. Moral skill, yakni kemampuan untuk memberikan bobot dan makna dari sesuatu yakni kemampuan mengarahkan sesuatu yang dilakukan atas dasar dasar kejujuran, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keinginan mewujudkan kesejahteraan bersama diantara sesama anggota karyawan. (dalam Abuddin, 2003;367)

Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut maka ia haruslah mempunyai pengaruh untuk memimpin para bawahannya.

Kepemimpinan adalah gejala sosial, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara-cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap menjadi integratif. (dalam Ndraha, 2013;216)

Kepemimpinan juga sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan seolah-olah dipaksa untuk menghadapi berbagai macam faktor seperti struktur atau tantangan, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisasi. Kepemimpinan dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan yang menimpa suatu organisasi tersebut, saat organisasi itu berada dalam pimpinannya.

Kepemimpinan sebagaimana pendapat Stogdill (1974) (dalam Abdullah, 2011;10) dalam bukunya *Handbook of Leadership*, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok.
2. Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh.
3. Kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan kesesuaian paham atau kesetiaan, kesepakatan.
4. Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengaruh.
5. Kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku.
6. Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi.
7. Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan/ kekuasaan.

8. Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan.
9. Kepemimpinan adalah suatu hasil dan interaksi.
10. Kepemimpinan adalah peranan yang dipilihkan.
11. Kepemimpinan adalah inisiasi (permulaan) dari struktur.

Menurut Siswanto (2009;169) kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis agar tercapainya efisiensi dan efektivitas guna mencapai tingkat produktivitas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, memperoleh dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.

Berdasarkan kesimpulan penulis Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerjasama (mengolaborasi dan mengolaborasi potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Konsep Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan kata me- menjadi kata membina berarti membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih maju. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal

umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/ umum dan intruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga.

Menurut Musanef (2000;47) pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kemudian menurut Hidayat (2000;26) pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengaruh, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Widjaja (2001;139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Menurut Miftah Thoha (2007;8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Hendrawan (2001;83) kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi yang dilakukan menyangkut dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal pokok tersebut adalah penyangkutan pengembangan dan pelebagaan organisasi dalam menjalankan usaha organisasi.

Pembinaan menurut Santoso (2005;57) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Menurut Santoso pembinaan dapat dilakukan dengan penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemampuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjuk kepada “perbaikan” atas sesuatu. (dalam Miftah Thoha, 2008;207)

Menurut Nurcholis (2005;33) tujuan dari pembinaan yaitu:

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.
2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
3. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara.
4. Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
5. Diarahkan kepada penyaluran, pengeluaran dan pemanfaatan pegawai.
6. Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja.

Selanjutnya menurut Karyadi (2003;12) bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain:

1. Pemberian petunjuk
2. Pemberian pendidikan dan latihan
3. Pemberian bimbingan

Kemudian menurut Manullang (2009;11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Berdasarkan kesimpulan penulis Pembinaan merupakan suatu usaha meningkatkan pengetahuan anggota dari suatu organisasi untuk melakukan suatu

kegiatan meliputi perencanaan, pengarahan, pengembangan, dan pengendalian.

Tentunya dalam suatu usaha pembinaan memiliki tujuan, yaitu:

- a. Membuat kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi pimpinan.
- b. Menyamakan upaya insuksi yang diberikan oleh pimpinan yang mana harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga kerja masing-masing bagian tersebut dapat terintegrasi dengan baik.
- c. Memotivasi anggota organisasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Menjaga stabilitas organisasi yang mana segala usaha dan kegiatan serta program dapat selalu terjaga dengan baik.
- e. Menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar
- f. Penggunaan sumber daya secara efisien.

Sedangkan menurut Effendi (2003;24) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik.

Pembinaan menurut Santoso (2005;57) adalah usaha memelihara, melihat, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Menurut Santoso pembinaan dapat dilakukan dengan bimbingan, pengarahan dan penyuluhan.

a. Penyuluhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan dan petunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses

atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi dari orang lain dari semula yang tidak tau menjadi tau dan yang tau menjadi lebih tau.

Penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “stakeholders” melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan (dalam Notoatmodjo, 2012)

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku dikalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan. (dalam Subejo, 2010)

Penyuluhan menurut Gondoyoewono adalah suatu penerangan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang. (dalam Nofalia, 2011)

Berdasarkan kesimpulan penulis Penyuluhan adalah proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan perilaku individu atau sekelompok orang agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Pengarahan

Menurut George R. Terry (dalam Hasibuan, 2007;183) mengatakan bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dengan secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Kemudian menurut Saure dan Dislainer (dalam Wanadiana, 2010) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.

Sedangkan menurut Siswanto (2007;111) menyatakan pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

Menurut Hasibuan (2006;184) pengarahan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Berdasarkan kesimpulan penulis Pengarahan adalah merupakan proses pemberian petunjuk, instruksi, dan bimbingan dari pimpinan kepada bawahan agar bekerja sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

c. Bimbingan

Menurut Bimo Walgito (2004;5) mengatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu-individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan didalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Menurut Prayitno dan Erman (2004;99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang atau beberapa individu baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Menurut Crow&Crow (dalam Prayitno, 2004;94) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang individu untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri,

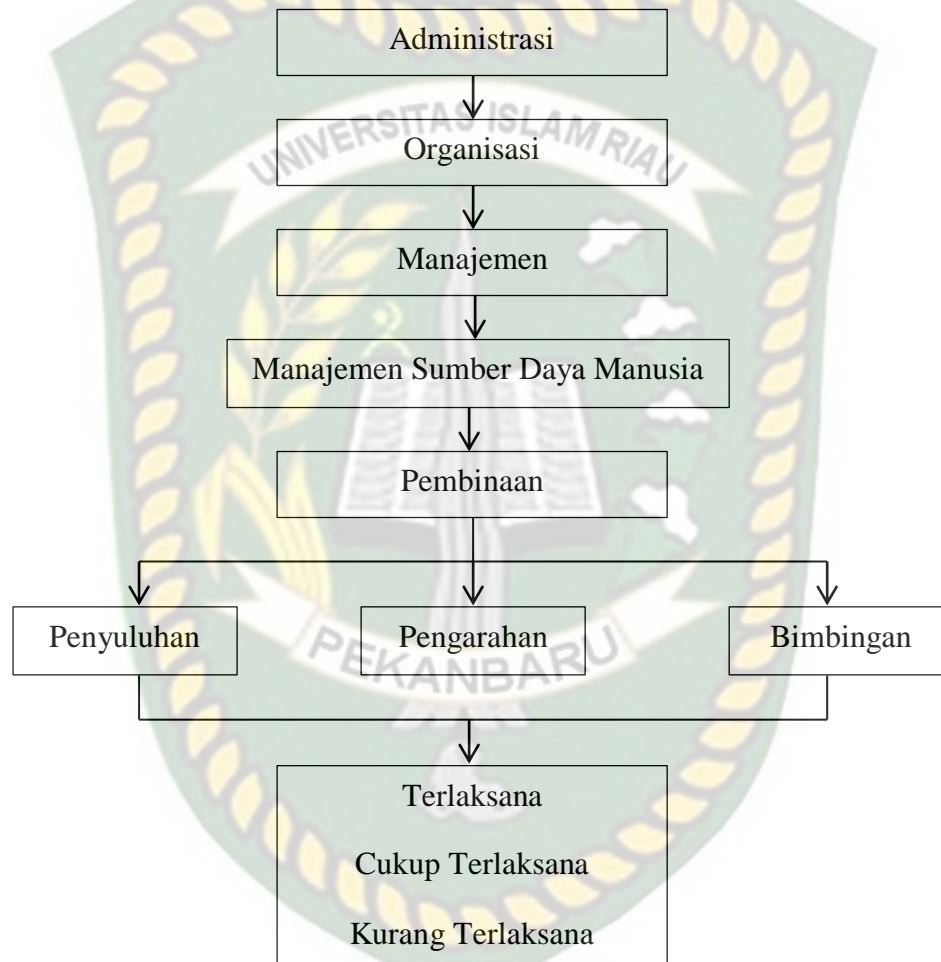
mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri.

Bimbingan secara umum menurut Walgito (2010;7) adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupan sehingga individu ini dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan kesimpulan penulis Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi penulis, 2020

C. Konsep Operasional

Konsep operasional yaitu penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

6. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan.
7. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
 - a. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “stakeholders” melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan.
 - b. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberi pengarahan dan intruksi kepada aparatur desa dan masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
 - c. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada suatu individu melalui pendidikan dan petunjuk, agar yang diberikan bimbingan dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi

D. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Pembinaan menurut Santoso (2005:57) adalah usaha memelihara, melihat, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyuluhan	a. Membuat program penyuluhan	Terlaksanakan
			b. Adanya pertemuan diskusi dan musyawarah	Cukup Terlaksanakan
			c. Melaksanakan program yang telah dibuat	Kurang Terlaksana
			d. Keikutsertaan partisipasi	
		2. Pengarahan	a. Memberikan arahan/intruksi	Terlaksana
			b. Mengatur kegiatan pembinaan kemasyarakatan	Cukup Terlaksana Kurang Terlaksanakan
3. Bimbingan	a. Memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi	Terlaksanakan		
	b. Memberi masukan	Cukup Terlaksanakan		
	c. Menggerakkan kegiatan mengenai pembinaan kemasyarakatan	Kurang terlaksanakan		

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan menetapkan kategori untuk ukuran penelitian setiap Variabel, yaitu:

Terlaksana : Apabila rata- rata penilaian jawaban terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya berada pada persentase 68%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila rata- rata penilaian jawaban terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya berada pada persentase 34%-67%.

Tidak Terlaksana : Apabila rata- rata penilaian jawaban terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya berada pada persentase 0%-33%.

Sedangkan untuk pengukuran Variabel digunakan kategori sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Terlaksana : Apabila semua sub indikator terlaksanakan oleh Kepala Desa Dengan presentase 68%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hanya sebagian sub indikator yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persentase 34%-67%.

Kurang Terlaksana : Apabila tidak ada satupun sub indikator yang terlaksanakan dengan persentase 0%-33%.

2. Pengarahan

Terlaksana : Apabila semua sub indikator terlaksanakan oleh Kepala Desa Dengan presentase 68%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hanya sebagian sub indikator yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persentase 34%-67%.

Kurang Terlaksana : Apabila tidak ada satupun sub indikator yang terlaksanakan dengan persentase 0%-33%.

3. Bimbingan

Terlaksana : Apabila semua sub indikator terlaksanakan oleh Kepala Desa Dengan presentase 68%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hanya sebagian sub indikator yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan persentase 34%-67%.

Kurang Terlaksana : Apabila tidak ada satupun sub indikator yang terlaksanakan dengan persentase 0%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Peneliti menggunakan tipe survey deskriptif karena dalam penelitian ini penulis secara langsung turun tangan kelapangan guna untuk mencari data- data responden. Data yang dimaksud adalah data mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif karena proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terstruktur, kuesioner, data berbentuk numerik, hasil analisis didasarkan pada sampel yang merupakan representasi dari populasi dan penelitian kuantitatif mengutamakan objektivitas data dalam mengkaji suatu fenomena sosial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun pemilihan Lokasi penelitian di Desa Kubang Jaya ialah dikarenakan menurut data yang didapat mengenai kehidupan masyarakat Desa terlihat masih terdapat permasalahan dan peran Kepala Desa yang terlihat kurang terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti.

Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti.

Penarikan sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, dan peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi maka peneliti perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau baru kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini untuk Perangkat Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kasi Desa, Ketua BPD, RT/ RW dan Kepala Dusun yang berjumlah 21 orang. Sedangkan untuk Populasi masyarakat adalah Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 1.500 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian terkecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi. Hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau toleransi kesalahan (error tolerance) yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat toleransi kesalahan pada penelitian adalah 5%, 10% dan 15%, maksimal tingkat kesalahannya yang diambil adalah 5% (0,05). Semakin besar tingkat kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel, dan sebaliknya semakin kecil tingkat kesalahan maka semakin besar jumlah sampel yang diperoleh.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No.	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Kaur Keuangan	1	1	100%
4.	Kaur Perencanaan	1	1	100%
5.	Kasi Pemerintahan	1	1	100%
6.	Kasi Kesejahteraan	1		100%
7.	Ketua BPD	1	1	100%
8.	Kepala Dusun	2	2	100%
9.	Tokoh Masyarakat	2	2	100%
10.	Ketua RW	2	2	100%
11.	Ketua RT	8	8	100%
12.	Kepala Keluarga	1.500	44	10%
	Jumlah	1.521	65	-

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n : Jumlah Sampel
 N : Jumlah Populasi
 e : Batas Toleransi Kesalahan (Error Tolerance)

Dalam penelitian kali ini saya mengambil toleransi kesalahan sebesar 15% (0,15), sehingga perhitungan menggunakan rumus Slovin untuk masyarakat (KK) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + N e^2) \\ &= 1500 / (1 + 1500 \times 0,15^2) \\ &= 43.16 \text{ dibulatkan menjadi } 44 \end{aligned}$$

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masyarakat adalah 44 Kepala Keluarga (KK).

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua BPD, Ketua RT dan Ketua RW menggunakan teknik sensus, karena jumlah populasi perangkat desa dikantor Desa Kubang Jaya relatif sedikit dan juga mudahnya responden untuk dapat dijumpai karena berada ditempat kerja sehingga memungkinkan untuk disensus satu per satu dan mengambil informasi sumber data dari responden.

Sedangkan untuk Masyarakat (KK) menggunakan teknik Purposive Sampling dimaksud agar sampel/ responden tertentu saja yang dianggap mewakili dan mengetahui serta lebih memahami tentang permasalahan yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu :

1. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian) melalui penelitian lapangan yaitu dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Keluarga terkait data tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara dan observasi.
2. **Data Sekunder** yaitu data yang diperoleh dari publikasi di Kantor Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan menggunakan instrumen dokumentasi. Data tersebut seperti: Struktur Desa, Bagan Struktur Organisasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen-dokumen terkait tentang Pembinaan Kemasyarakatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kubang Jaya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih rinci mengenai “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan dalam penelitian. Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan data berupa tanggapan responden mengenai variabel atau permasalahan yang diteliti. Kuesioner ini disebarkan

kepada responden yaitu masyarakat tertentu saja yang dianggap mewakili dan mengetahui dan lebih memahami tentang permasalahan yang diteliti.

3. Observasi

Observasi yaitu salah satu cara atau yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dilapangan. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen. Baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

G. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kondisi, kenyataan atau fakta- fakta yang ada dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2.	Seminar UP					■	■	■	■																				
3.	Revisi UP									■	■	■	■																
4.	Revisi Kuesioner													■	■	■	■												
5.	Rekomendasi Survey													■	■	■	■												
6.	Survey Lapangan																	■	■	■	■								
7.	Analisis Data																					■	■	■	■				
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					■	■	■	■				
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																									■	■	■	■
10.	Ujian Konferehensif Skripsi																												
11.	Revisi Skripsi																									■	■	■	■
12.	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km^2 merupakan daerah yang terletak antara $1^{\circ}00'40''$ Lintang Utara sampai $0^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}28'30''$ – $101^{\circ}14'30''$ Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)
- Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Ibu Kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru Pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, Tambusai. Pembantu Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kualu Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah Pembantu Bupati Wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan, sebagai hasil dari pemekaran 12 Kecamatan sebelumnya, yaitu :

1. Bangkinang (Ibu kota Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Ibu kota Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Ibu kota Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (Ibu kota Kebun Durian)
5. Kampar (Ibu kota Air Tiris)
6. Kampar Kiri (Ibu kota Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (Ibu kota Sei. Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (Ibu kota Gema)
9. Kampar Timur (Ibu kota Kampar)
10. Kampar Utara (Ibu kota Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (Ibu kota Pantai Raja)

12. Rumbio Jaya (Ibu kota Teratak)
13. Salo (Ibu kota Salo)
14. Siak (Ibu kota Salo)
15. Tambang (Ibu kota Pangkalan Baru)
16. Tapung (Ibu kota Sei. Piang)
17. Tapung Hilir (Ibu kota Kota Garo)
18. Tapung Hulu (Ibu kota Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (Ibu kota Batu Bersurat)
20. Kampar Kiri Tengah (Ibu kota Simalinya)
21. Koto Kampar Hulu (Ibu kota Tanjung)

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Kota Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang)

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21°C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35°C.

2. Gambaran Kecamatan Siak Hulu

Kecamatan Siak Hulu merupakan kecamatan yang terletak paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten sekitar 75 km, sedangkan jarak dengan ibu kota Provinsi sekitar 28 km dan jarak ibu kota kecamatan dengan desa/ kelurahan yang terjauh sekitar 48 km, keadaan topografi tanah sebagian besar 87% merupakan tanah datar dan 13% bergelombang dan berbukit. Koordinat garis lintang (Latitude) 0,3904 LU/LS dan garis bujur (Longitude) 101,5462 BT.

Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang luas wilayahnya menurut kantor camat adalah ± 98.707 Ha (170,36 km²) yang terdiri dari 12 desa dengan pusat pemerintahan berada didesa pangkalan baru.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai Kotamadya Pekanbaru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang dan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Kecamatan Siak Hulu terdiri dari 12 Desa/ Kelurahan. Dilihat dari klarifikasi daerah semua Desa/ Kelurahan di Kecamatan Siak Hulu termasuk klarifikasi pedesaan. Nama –nama 12 Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Siak Hulu, dapat dilihat pada data tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel IV.1 : Jumlah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No.	Desa/ Kelurahan
1.	Buluh Nipis
2.	Pangkalan Baru
3.	Buluh Cina
4.	Lubuk Siam
5.	Teratak Buluh
6.	Desa Baru
7.	Tanah Merah
8.	Pandau Jaya
9.	Tanah Merah
10.	Kepau Jaya
11.	Tanjung Balam
12.	Kubang Jaya

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu 2020

3. Gambaran Desa Kubang Jaya

Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Siak Hulu yang merupakan bagian dari Kabupaten Kampar. Luas wilayah Desa Kubang Jaya sekitar 16.380 km². Desa Kubang Jaya merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Pekanbaru dari sebelah Utara. Desa Kubang Jaya salah satu alternative bagi penduduk Kotamadya Pekanbaru dan penduduk pendatang yang ingin mendapatkan hunian murah tetapi dekat dengan pusat kota dan fasilitas umum yang ada di Kotamadya Pekanbaru.

Sementara itu Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kotamadya Pekanbaru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu dan Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang

Nama Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kubang Jaya dan Desa Teratak Buluh diambil dari sebuah pohon kayu besar mirip seperti pohon beringin dengan nama Kayu Kubang yang tumbuh berdampingan dengan makam datuk keramat (Syeh Taram) dari Sumatera Barat yang kemudian terkenal sampai keluar daerah

Provinsi Riau dan bahkan sampai kemana negara yakni Daratan Cina dan Tiongkok.

Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah pemerintahan Desa Teratak Buluh mengingat wilayah Dusun IV Kubang Jaya memiliki potensi yang cukup besar dan dipandang mampu menjadi sebuah desa persiapan dengan nama Desa Kubang Jaya.

Desa Kubang Jaya salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang menjadi daerah tempat penelitian yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa Kubang Jaya terbagi menjadi 4 wilayah dengan nama Dusun :

1. Dusun I Sialang Indah : Ketua RW 2 dan Ketua RT 8
2. Dusun II Keramat Sakti : Ketua RW 4 dan Ketua RT 18
3. Dusun III Bencah Pudu Permai : Ketua RW 3 dan Ketua RT 10
4. Dusun IV Kasang Kulim : Ketua RW 4 dan Ketua RT 20

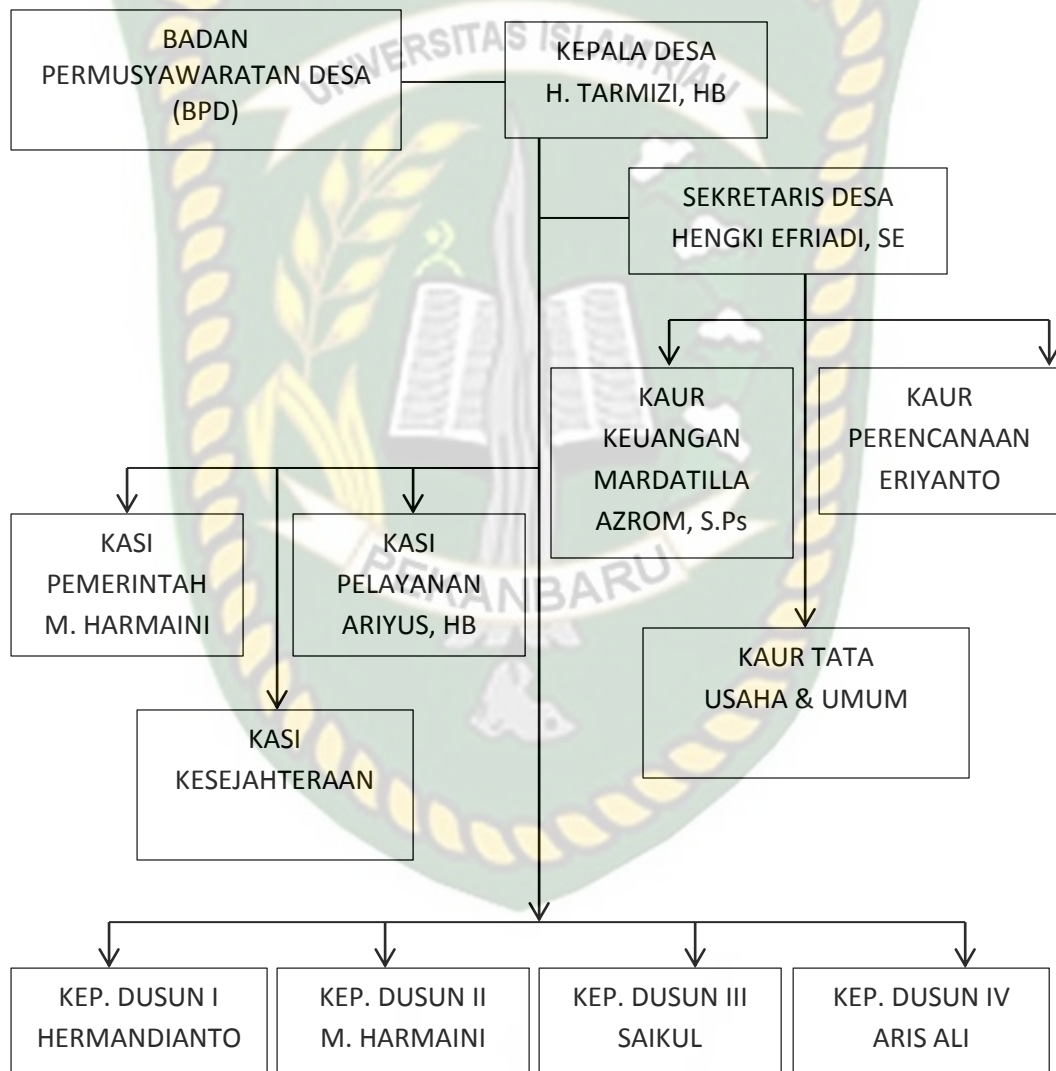
Desa Kubang Jaya ditinjau dari jarak wilayah pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 18 Km dengan lama jarak tempuh 40 menit
- b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 65 Km dengan jarak tempuh 1,5 jam
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi (Pekanbaru) 15 km dengan jarak tempuh 31 menit.

B. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kubang Jaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar VI.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya 2020

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengenai Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi dan Kaur Desa adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam unsur pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
 - c. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - d. Menyiapkan kegiatan rapat;
 - e. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset;
 - f. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan umum.
 - Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. Menyusun rencana regulasi desa;
 - c. Pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. Melaksanakan administrasi kependudukan;
 - g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
 - i. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.
 - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan

- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Kepala Dusun
 1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dan wilayahnya.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi dalam hal ini apa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kubang Jaya yang salah satunya dapat diketahui ialah sumber daya manusia. Yang mana sumber daya manusia merupakan bagian terpenting bagi organisasi yang merupakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelasnya

adapun sumber daya organisasi Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2 : Daftar Sumber Daya Organisasi Pemerintah Desa Kubang Jaya

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kasi Pelayanan	1
4.	Kasi Pemerintah	1
5.	Kaur Perencanaan	1
6.	Kaur Keuangan	1
7.	Badan Permusyawaratan Desa	1
8.	Kepala Dusun	2
9	RW	2
10	RT	8
11	Tokoh Masyarakat	2
Jumlah		21

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pemerintah Desa Kubang Jaya memiliki pelaksana Pemerintahan Desa berjumlah 21 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintah, Kasi Pelayanan, Ketua BPD, Kadus, RW/ RT dan Tokoh Masyarakat yang mana dari segi jumlah mencukupi untuk melakukan dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Terlebih dahulu penulis akan memaparkan Identitas Responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam menunjang hasil penelitian adalah berupa Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Tingkat Umur.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan akan terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan responden berikut penulis paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.I : Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1.	SD/ Sederajat	6	10%
2.	SMP/ Sederajat	18	29%
3.	SMA/ Sederajat	20	31%
4.	D1 – D3	9	14%
5.	S1	10	16%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel V.I diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yang lulusan SD/ Sederajat berjumlah 6 orang atau 10%, lulusan SMP/ Sederajat berjumlah 18 orang atau 29%, lulusan SMA/ Sederajat berjumlah 20 orang atau 31%, lulusan D1 – D3 berjumlah 9 orang atau 14%, dan lulusan S1 berjumlah 10 orang atau 16%. Jadi bisa disimpulkan rata-rata responden adalah lulusan SMA/ Sederajat yang berjumlah 20 orang atau 31%.

2. Jenis Kelamin

Berikut penulis paparkan jenis kelamin responden pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 2 : Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1.	Laki – Laki	61	97%
2.	Perempuan	2	3%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan pada tabel V.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin responden laki-laki berjumlah 61 orang atau 97% dan jenis kelamin responden perempuan berjumlah 2 orang atau 3%. Melihat identitas responden yang penulis jabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan informasi yang relevam tentang penelitian yang penulis teliti.

3. Jenis Pekerjaan

Mengenai jenis pekerjaan responden Desa Kubang Jaya adalah Pedagang, Wiraswasta, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kantor Desa. Sebagian besar jenis pekerjaan responden mayoritas adalah wiraswasta. Untuk lebih jelasnya

berikut penulis jabarkan mengenai jenis pekerjaan responden pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Identitas Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase%
1	Petani	9	14%
2	Wiraswasta	31	50%
3	Aparatur Sipil Negara	14	22%
4	Pegawai Kantor Desa	9	14%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan pada tabel V.3 diatas dapat dijelaskan mengenai jenis pekerjaan responden adalah Petani berjumlah 9 orang atau 14%, Wiraswasta berjumlah 31 orang atau 50%, Aparatur Negeri Sipil (ASN) berjumlah 14 orang atau 22% dan pegawai Kantor Desa berjumlah 9 orang atau 14%.

4. Tingkat Umur

Berkenaan dengan tingkat umur responden Desa Kubang Jaya bervariasi. Sebagian besar tingkat umur responden adalah usia produktif atau matang dalam berfikir. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 : Identitas Responden berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase%
1.	25 – 30 Tahun	9	14%
2.	31 – 40 Tahun	20	32%
3.	41 – 50 Tahun	25	40%
4.	51 – 55 Tahun	9	14%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan pada tabel V.4 dapat dijelaskan mengenai tingkat umur diantara 25 – 30 Tahun berjumlah 9 orang atau 14%, 31 – 40 Tahun berjumlah 20 orang atau 32%, 41 – 50 Tahun berjumlah 25 orang atau 40% dan 51 – 55 Tahun berjumlah 9 orang atau 14%.

B. Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pemerintah instansi yang di bentuk oleh pemerintah pusat secara berpartisipasi dan berjenjang untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas yang bersifat kenegaraan yang telah ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, pemerintah dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan seperti halnya Negara yang masih menjunjung hak dan kebudayaan daerah itu sendiri, Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Sekretaris Desa serta Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa.

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Kepala Desa ialah Pembinaan Kemasyarakatan Desa, yang mana pembinaan ialah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keadaan masyarakat Desa menjadi lebih baik dan maju. Khususnya di Desa Kubang Jaya Kepala Desa melakukan pembinaan dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, Kebudayaan & Keagamaan, Kepemudaan & Olahraga, Kelembagaan Masyarakat dengan cara

melakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung kehidupan masyarakat Desa menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan, Kepala Desa melakukan penyuluhan, pengarahan dan bimbingan terhadap perangkat dan pelaksana kegiatan yang ditunjuk termasuk masyarakat desa.

Setelah menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden penelitian yang terdiri dari Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kubang Jaya , maka selanjutnya setelah angket tersebut diisi oleh responden peneliti mengelola data tersebut, melakukan pengelompokan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing serta akan dijelaskan berurutan perindikator dan masing-masing pembagian responden penelitian yang terdiri dari Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Kubang Jaya yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan Desa. Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat Desa relatif rendah karena itu pembinaan dari Kepala Desa sangat diperlukan terutama melalui pemberian penyuluhan bagi masyarakat yang ada di Desa Kubang Jaya.

Sehubungan dengan pemberian penyuluhan berdasarkan temuan di lapangan, berikut penulis paparkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Pemerintah Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Penyuluhan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Membuat Program Penyuluhan	15 (79%)	4 (21%)	-	19 (100%)
2.	Mengadakan Pertemuan Diskusi dan Musyawarah	16 (84%)	3 (16%)	-	19 (100%)
3.	Melaksanakan Kegiatan yang telah dibuat	10 (53%)	9 (47%)	-	19 (100%)
4.	Keikutsertaan dan Partisipasi	10 (53%)	9 (47%)	-	19 (100%)
Jumlah		51	25	-	76
Rata – Rata		13	6	-	19
Persentase%		69%	31%	-	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 20 orang, terlihat tanggapan responden terhadap indikator penyuluhan menjawab terlaksana dengan rata-rata 13 orang (69%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana rata-rata menjawab 6 orang (31%), sedangkan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada.

Dalam indikator penyuluhan terdapat 4 item penilaian, untuk item pertanyaan pertama, mengenai membuat program penyuluhan dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang (79%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa pernah melakukan penyuluhan, 4 orang (21%) menjawab cukup terlaksana dengan tidak memberikan alasan.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai mengadakan pertemuan diskusi dan musyawarah dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (84%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa selalu mengadakan musyawarah dalam menentukan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di Desa, 3 orang (16%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan pernah diadakan musyawarah tetapi tidak semua pemerintah desa hadir dan juga minimnya partisipasi masyarakat.

Untuk item pertanyaan ketiga, mengenai melaksanakan kegiatan yang telah dibuat dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (53%) menjawab terlaksana dengan alasan terlihat pembangunan fisik di desa untuk kehidupan masyarakat desa lebih baik, 9 orang (47%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan kepala desa melaksanakan kegiatan yang ada di Desa, akan tetapi masih ada kegiatan yang belum berjalan dengan baik.

Untuk item pertanyaan keempat, mengenai keikutsertaan dan partisipasi dapat dilihat bahwa 10 orang (53%) menjawab terlaksana dengan alasan setiap kegiatan dilakukan masyarakat selalu ikut pelaksanaannya dan sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa, 9 orang (47%) menjawab cukup

terlaksana dengan alasan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung kegiatan cukup terlaksana tetapi dalam segi jumlah tergolong sedang.

Dengan demikian melalui item penilaian yang dinilai bahwa tanggapan responden yang mengatakan terlaksana sebanyak 13 orang (69%), kemudian yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 6 orang (31%). Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan responden pemerintah desa terlihat bahwa Kepala Desa Kubang Jaya telah melakukan penyuluhan kepada pemerintah desa serta masyarakat Desa yang mana dilakukan pada saat rapat. Penyuluhan ini juga berarti menentukan kegiatan bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga melalui penyuluhan ini kebutuhan kehidupan masyarakat terpenuhi dan masyarakat tahu tentang kegiatan apa saja yang ada di desa, berdasarkan tanggapan responden pemerintah desa dengan indikator penyuluhan berdasarkan persentase tertinggi berada pada kategori **“Terlaksana”**, karena persentase 69% terletak pada interval 68% - 100%.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Kubang Jaya mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Masyarakat Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Penyuluhan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Membuat Program Penyuluhan	10 (23%)	15 (34%)	19 (43%)	44 (100%)
2.	Mengadakan Pertemuan Diskusi dan Musyawarah	10 (20%)	22 (50%)	12 (30%)	44 (100%)
3.	Melaksanakan Kegiatan yang telah dibuat	11 (20%)	19 (43%)	14 (37%)	44 (100%)
4.	Keikutsertaan dan Partisipasi	9 (21%)	25 (57%)	10 (22%)	44 (100%)
Jumlah		40	81	55	176
Rata – Rata		10	20	14	44
Persentase%		23%	45%	32%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 44 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai membuat program penyuluhan dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (23%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa ada mengadakan rapat atau penyuluhan, 15 orang (34%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan masih adanya masyarakat yang

tidak mengetahui adanya penyuluhan, 19 orang (43%) menjawab tidak terlaksana dengan tidak memberikan alasan.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai mengadakan pertemuan diskusi dan musyawarah dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (20%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa biasanya mengadakan musyawarah bersama aparat desa dan juga mengundang masyarakat, 22 orang (50%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan tidak semua masyarakat yang hadir hanya sebagian kecil saja, yang menghadiri biasanya hanya perangkat desa, 12 orang (30%) menjawab kurang terlaksana dengan alasan tidak pernah menghadiri musyawarah.

Untuk item pertanyaan ketiga, mengenai melaksanakan kegiatan yang telah dibuat dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang (20%) menjawab terlaksana dengan alasan adanya kemajuan pembangunan di desa, 19 orang (43%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan masih adanya kegiatan yang belum terlaksana, 14 orang (37%) menjawab tidak terlaksana dengan tidak memberikan alasan.

Untuk item pertanyaan keempat, mengenai keikutsertaan dan partisipasi dapat dilihat bahwa 9 orang (21%) menjawab terlaksana dengan alasan masyarakat desa selalu diikuti sertakan dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa termasuk pembangunan yang dilakukan bersama, 25 orang (57%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan masih adanya masyarakat yang tidak ikut kegiatan dikarenakan sibuk bekerja dan tidak tahu adanya kegiatan di desa, 10 orang (22%) menjawab tidak terlaksana dengan tidak memberikan alasan.

Dengan demikian melalui item penilaian yang dinilai bahwa tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang (23%), kemudian yang

menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 orang (45%), serta yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 14 orang (32%). Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan responden masyarakat desa bahwa penyuluhan mengenai fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di desa sudah dilakukan namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya penyuluhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya (Di Rumah Kepala Desa, Pada Pukul 10.32 WIB - Jum'at 9 Juli 2021) mengenai indikator penyuluhan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Penyuluhan tentunya wajib dilakukan untuk mensosialisasikan kegiatan di Desa. Seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat. Dimana saya memberikan penjelasan serta penerangan kepada masyarakat bahwa pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terselenggaranya siskamling yang kondusif dengan aktifnya pos kamling dan ronda malam sebagai wadah masyarakat dalam mengamankan lingkungan dari ancaman kejahatan, sehingga akan meminimalisir kejahatan terutama dimalam hari”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Hengky Efriadi, SE selaku Sekretaris Desa (Di Kantor Desa Kubang Jaya, Pada Pukul 10.23 WIB - Selasa, 13 Juli 2021) mengenai indikator penyuluhan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ada, kepala desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, mengajak, serta mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa contohnya penyuluhan mengenai program kegiatan keamanan, ketertiban umum & perlindungan masyarakat, kepala desa mengajak seluruh masyarakat untuk membenahi dan memelihara pos ronda yang ada di lingkungan masyarakat serta melakukan kegiatan siskamling secara efektif”

Penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu responden yaitu Bapak Ridho Septian (Di Rumah nya, Pada Pukul 16.00 WIB - Minggu, 18 Juli 2021) mengenai indikator penyuluhan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kepala Desa memang memberikan penyuluhan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mengenai pembinaan kemasyarakatan desa kepada masyarakat, namun Kepala Desa tidak melihat kembali apakah berjalan atau tidaknya kegiatan tersebut. Contohnya dalam kegiatan keamanan, ketertiban umum & perlindungan masyarakat, di beberapa dusun tidak tersedianya pos ronda/ pos kamling sehingga masyarakat tidak pernah melakukan kegiatan siskamling maupun ronda malam untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar masyarakat”

Berdasarkan hasil observasi analisa dari penulis mengenai indikator penyuluhan dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah memberikan penyuluhan untuk kegiatan atau program yang ada di desa dengan cara mengikutsertakan masyarakat didalam menentukan kegiatan akan tetapi masih ada kegiatan yang belum berjalan dengan baik dan juga partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah.

Dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan khususnya smengenai pemberian penyuluhan berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**, karena persentase 45% terletak pada interval 34% - 67%.

2. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberikan arahan, perintah atau intruksi kepada perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk membantu tugas kepala desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan pemberian pengarahan berdasarkan temuan di lapangan, berikut penulis paparkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Pemerintah Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Pengarahan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Memberikan Arahan/ Intruksi	19 (100%)	-	-	19 (100%)
2.	Mengatur Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	8 (42%)	11 (58%)	-	19 (100%)
Jumlah		27	11	-	38
Rata – Rata		13	6	-	19
Persentase%		68%	32%	-	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 20 orang, terlihat tanggapan responden terhadap indikator pengarahan menjawab terlaksana dengan rata-rata 13 orang (68%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana rata-rata menjawab 6 orang (32%), sedangkan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada.

Item penilaian pertama mengenai fungsi kepala desa dalam memberikan arahan/ intruksi dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa sebanyak 19 orang (100%) menjawab terlaksana dengan alasan biasanya kepala desa memberikan intruksi atau perintah pada saat rapat untuk melaksanakan tugas dan fungsi aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan di desa.

Kemudian item penilaian kedua mengenai fungsi kepala desa dalam mengatur kegiatan pembinaan kemasyarakatan dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa sebanyak 8 orang (42%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa mengatur kegiatan melalui peraturan desa agar terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan yang mana juga sebagai aturan yang berlaku, 11 orang (58%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan kepala desa mengatur atau mengawasi kegiatan akan tetapi masih ada yang belum berjalan dengan baik.

Dengan demikian melalui item penilaian yang dinilai bahwa tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 13 orang (68%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang (32%). Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan pemerintah desa terlihat bahwa kepala desa telah memberikan arahan/ intruksi dan mengatur kegiatan pembinaan kemasyarakatan, berdasarkan tanggapan responden pemerintah desa dengan indikator pengarahannya berdasarkan persentase tertinggi berada pada kategori **“Terlaksana”**, karena persentase 68% terletak pada interval 68% - 100%.

Selanjutnya untuk melihat jawaban dan tanggapan responden masyarakat Kubang Jaya mengenai pengarahannya yang dilakukan oleh kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Masyarakat Kubang Jaya Mengenai Indikator Pengarahan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Memberikan Arahan/ Intruksi	10 (23%)	25 (57%)	9 (20%)	44 (100%)
2.	Mengatur Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	9 (20%)	28 (64%)	7 (16%)	44 (100%)
Jumlah		19	53	16	88
Rata-Rata		9	27	8	44
Persentase%		21%	61%	18%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 44 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai memberikan arahan/ intruksi dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (23%) menjawab terlaksana dengan alasan adanya arahan/ intruksi yang diberikan oleh Kepala Desa pada saat menjalankan kegiatan, 25 orang (57%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan kepala desa memberikan arahan/ intruksinya tidak tegas sehingga tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh aparatur desa, 9 orang (20%) menjawab tidak terlaksana dengan alasan tidak tahu adanya arahan/ intruksi yang berikan oleh Kepala Desa.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai mengatur kegiatan pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa sebanyak 9 orang (20%) menjawab terlaksana dengan alasan adanya peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa, 28

orang (64%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan tidak semua kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kemasyarakatan diatur langsung oleh kepala desa, 7 orang (16%) menjawab kurang terlaksana dengan tidak memberikan alasan.

Dengan demikian melalui item penilaian yang dinilai bahwa tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang (21%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 orang (61%), serta yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 8 orang (18%). Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan responden masyarakat desa bahwa pengarahan mengenai fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di desa cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya (Di Rumah Kepala Desa, Pada Pukul 10.32 WIB - Jum'at 9 Juli 2021) mengenai indikator pengarahan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pengarahan yang saya berikan ada seperti memerintahkan perangkat Desa bekerja sesuai tugas dan fungsinya, dan juga memerintahkan masyarakat untuk ikut serta didalam kegiatan yang ada di Desa. Selain itu disaat kita mengadakan rapat/ musyawarah didesa, itu terus kita sampaikan bahwasannya sosialisasi kita didedukasikan kepada RT/ RW itu agar mereka menyampaikan juga kepada masyarakat. Karena mengumpulkan warga dalam rapat itu tidak mungkin, tapi mungkin disana ada perwiridan RT/ Paguyuban kita sampaikan kepada masyarakat kita sosialisasikan program desa kita ini bagaimana kamtibmasnya, bagaimana dengan menjaga lingkungan disekitar masyarakat yang ada di desa”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Hengky Efriadi, SE selaku Sekretaris Desa (Di Kantor Desa Kubang Jaya, Pada Pukul 10.23 WIB - Selasa, 13 Juli 2021) mengenai indikator pengarahan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Mengenai pengarahan dalam pembinaan kemasyarakatan, yang pernah Kepala Desa lakukan adalah memberikan langkah-langkah terhadap berbagai kehidupan masyarakat di desa. Seperti menanggulangi keamanan lingkungan,

arahan kepada RT/ RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dan kegiatan yang bersifat kepemudaan”

Penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu responden yaitu Bapak Awaludin (Di Rumah nya, Pada Pukul 13.20 WIB - Minggu, 25 Juli 2021) mengenai indikator pengarahan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Menurut sepengetahuan saya, Kepala Desa telah memberikan arahan kepada RT/ RW mengenai pembinaan kemasyarakatan, tetapi kepala desa tidak memberikan petunjuk maupun penjelasan yang tepat kepada RT/ RW bagaimana caranya agar masyarakat mau bekerja sama dan berpartisipasi untuk program kegiatan yang ada di desa kita. Contohnya dalam kegiatan pos kamling/ pos ronda, Kepala Desa memberi arahan bahwasannya harus mengadakan kegiatan siskamling, sementara di beberapa wilayah yang ada disekitar masyarakat pos ronda itu tidak ada. Jadi, bagaimana siskamling itu dilakukan jika pos ronda saja tidak ada dilingkungan masyarakat”

Berdasarkan hasil observasi analisa dari penulis mengenai indikator pengarahan dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah melakukan intruksi kepada aparatur desa untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun tidak semua intruksi yang disampaikan kepala desa itu tepat, banyak masyarakat yang tidak paham tentang intruksi ataupun arahan yang disampaikan kepala desa sehingga masih banyak kegiatan yang belum terlaksanakan.

Dari hasil kuesioner, wawancara dan oberservasi diatas dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan khususnya mengenai pemberian pengarahan berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**, karena persentase 61% terletak pada interval 34% - 67%.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan kepala desa untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan, menjalankan kegiatan yang dibuat Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan pemberian bimbingan berdasarkan temuan di lapangan, berikut penulis paparkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Pemerintah Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Bimbingan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	Memberikan Bimbingan, Pedoman, dan Motivasi	19 (100%)	-	-	19 (100%)
2.	Memberi Masukan	19 (100%)	-	-	19 (100%)
3.	Menggerakkan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	8 (42%)	11 (58%)	-	19 (100%)
Jumlah		46	11	-	57
Rata-Rata		15	4	-	19
Persentase%		79%	21%	-	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 19 orang, terlihat tanggapan responden terhadap indikator bimbingan menjawab terlaksana dengan rata-rata 15 orang (79%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana rata-rata menjawab 4 orang (21%), sedangkan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada.

Item penilaian pertama adalah memberikan bimbingan, pedoman, dan motivasi dapat dilihat bahwa sebanyak 19 orang (100%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa selalu melakukan bimbingan pada saat musrenbang, dengan memberikan pedoman dan motivasi bagaimana seharusnya pelaksanaan suatu kegiatan agar berjalan dengan baik dan juga membahas mengenai apa saja yang dilakukan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kemudian untuk item penilaian kedua memberi masukan dapat dilihat bahwa sebanyak 19 orang (100%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa selalu memberikan masukan kepada aparatur desa pada saat pertemuan tertentu atau ada rapat tertentu yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Kemudian untuk item penilaian ketiga menggerakkan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat sebanyak 8 orang (42%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa telah menggerakkan kegiatan untuk pembinaan kemasyarakatan terlihat dari adanya pembangunan poskesdes dan kegiatan posyandu. Kemudian jawaban cukup terlaksana sebanyak 11 orang (58%) dengan alasan kepala desa telah menggerakkan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kemasyarakatan seperti kegiatan gotong-royong di desa, namun belum sepenuhnya kegiatan pembinaan kemasyarakatan berjalan dengan maksimal.

Dengan demikian melalui item penilaian yang dinilai bahwa tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 15 orang (79%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 4 orang (21%). Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan responden pemerintah desa bahwa Kepala Desa Kubang Jaya telah memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi serta memberikan masukan kepada aparatur desa, namun aparatur desa belum sepenuhnya menggerakkan kegiatan yang tujuannya untuk pembinaan kemasyarakatan didesa, berdasarkan tanggapan responden pemerintah desa dengan indikator bimbingan berdasarkan persentase tertinggi berada pada kategori **“Terlaksana”**, karena persentase 79% terletak pada interval 68% - 100%.

Selanjutnya untuk melihat jawaban dan tanggapan responden masyarakat Kubang Jaya mengenai bimbingan yang dilakukan oleh kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Masyarakat Desa Kubang Jaya Mengenai Indikator Bimbingan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Memberikan Bimbingan, Pedoman, dan Motivasi	9 (20%)	25 (57%)	10 (23%)	44 (100%)
2.	Memberi Masukan	10 (23%)	25 (57%)	9 (20%)	44 (100%)

1	2	3	4	5	6
3.	Menggerakkan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	7 (16%)	27 (61%)	10 (23%)	44 (100%)
Jumlah		26	77	29	132
Rata-Rata		9	25	10	44
Persentase%		20%	55%	25%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dilihat dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 44 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai memberikan bimbingan, pedoman, dan motivasi dapat dilihat bahwa sebanyak 9 orang (20%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa ada memberikan bimbingan mengenai pembinaan kemasyarakatan, 25 orang (57%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti adanya rapat yang diadakan oleh kepala desa guna memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi kepada masyarakat desa, 10 orang (23%) menjawab tidak terlaksana dengan tidak memberikan alasan.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai memberi masukan dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (25%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa ada memberikan masukan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, 25 orang (57%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan tidak semua masyarakat yang mengerti tentang masukan yang diberikan oleh kepala desa mengenai kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan efektif, 9 orang (20%)

menjawab kurang terlaksana dengan alasan kepala desa tidak ada memberikan masukan mengenai kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk item pertanyaan ketiga, mengenai menggerakkan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang (16%) menjawab terlaksana dengan alasan kepala desa ada menggerakkan kegiatan mengenai pembinaan kemasyarakatan, 27 orang (61%) menjawab cukup terlaksana dengan alasan kepala desa hanya mengatur kegiatan apa saja yang akan dilakukan tetapi kepala desa tidak menggerakkan kegiatan tersebut secara bersama-sama, 10 orang (23%) menjawab tidak terlaksana dengan alasan kepala desa tidak pernah menggerakkan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kemasyarakatan.

Dengan demikian melalui item penilaian yang dinilai bahwa tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang (20%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 orang (55%), serta yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 10 orang (25%). Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan responden masyarakat desa mengenai bimbingan dalam fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di desa sudah dilakukan namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bimbingan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya (Di Rumah Kepala Desa, Pada Pukul 10.32 WIB - Jum'at 9 Juli 2021) mengenai indikator bimbingan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Di Desa kita ada pelatihan bahwasannya bimbingan kepada masyarakat itu sangat wajib kita lakukan. Apalagi Desa Kubang Jaya ini berada dibatas Kota Pekanbaru, masyarakatnya ada yang tinggal di perumahan dan ada yang tinggal dipemukiman. Contoh bimbingan kepada masyarakat itu mengadakan pelatihan, mengadakan pertemuan, kita juga melibatkan babinsar dan kamtibmas untuk mengadakan kerja sama/ sosialisasi kepada masyarakat seperti menjaga

keamanan dan lingkungan desa. Kita bahkan sampai mengadakan lomba pos ronda/ pos kekeamanan ditingkat RT/ RW untuk memotivasi masyarakat agar dapat bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menjaga lingkungan yang ada di masyarakat”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Hengky Efriadi, SE selaku Sekretaris Desa (Di Kantor Desa Kubang Jaya, Pada Pukul 10.23 WIB - Selasa, 13 Juli 2021) mengenai indikator bimbingan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kepala Desa selalu memberi bimbingan kepada masyarakatnya tentang pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya cuma tidak rutin, kepala desa memberikan bimbingan ketika ada sosialisasi, perkumpulan wirid RT/ RW dan Paguyuban, atau ada kunjungan dari orang dinas saja, dikarenakan terlalu sibuk untuk mengurus urusan pembangunan yang ada di Desa”

Penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu responden yaitu Bapak Yunet Agil (Di Rumah nya, Pada Pukul 10.45 WIB - Jum'at, 30 Juli 2021) mengenai indikator bimbingan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya, bimbingan yang diberikan kepala desa dalam segi keamanan dan ketertiban lingkungan belum sepenuhnya diberikan, kepala desa tidak pernah memberikan masukan tentang keamanan di desa dan juga kepala desa tidak ikut berpartisipasi serta membantu masyarakat yang ada di desa untuk menggerakkan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kemasyarakatan di desa. Dapat kita lihat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan pos kamling/ pos keamanan desa, beberapa dilingkungan RT/ RW tidak memiliki pos kamling/ pos keamanan akibatnya masyarakat tidak pernah melakukan siskamling/ ronda malam untuk menjaga keamanan desa”

Berdasarkan hasil observasi analisa dari penulis mengenai indikator bimbingan dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kubang Jaya biasanya dilakukan pada saat rapat, atau ada perwiridan di desa tetapi tidak semua masyarakat mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa karena saat rapat kehadiran masyarakat sangat minim.

Dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan khususnya mengenai pemberian bimbingan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, karena persentase 55% terletak pada interval 34% - 67%.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari responden penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat Desa Kubang Jaya, maka dilakukanlah rekapitulasi jawaban secara keseluruhan untuk mengetahui jawaban responden secara keseluruhan, yang pertama adalah rekapitulasi responden Pemerintah Desa Kubang Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah Desa tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyuluhan	13 (69%)	6 (31%)	-	19 (100%)
2	Pengarahan	13 (69%)	6 (31%)	-	19 (100%)
3	Bimbingan	15 (79%)	4 (21%)	-	19 (100%)
Jumlah		41	16	-	57
Rata-Rata		14	5	-	19
Persentase		74%	26%	-	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V.11 diatas terlihat bahwa jawaban responden Pemerintah Desa yang menjawab Terlaksana dengan rata-rata 14 responden atau persentase 74% selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 5 responden atau persentase 26% serta untuk responden yang menjawab tidak terlaksana tidak ada. Dari tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada dalam kategori “**Terlaksana**”.

Kategori terlaksana ini memiliki arti bahwa Kepala Desa telah melakukan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya sebagai Kepala Desa yang mana diukur dengan indikator pembinaan yaitu melakukan penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden Masyarakat Desa Kubang Jaya mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.12 : Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Desa tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Penyuluhan	10 (23%)	20 (45%)	14 (32%)	44 (100%)

1	2	3	4	5	6
2	Pengarahan	9 (21%)	27 (61%)	8 (18%)	44 (100%)
3	Bimbingan	9 (20%)	25 (55%)	10 (25%)	44 (100%)
Jumlah		28	72	32	132
Rata-Rata		9	24	11	44
Persentase%		20%	55%	25%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V.12 diatas terlihat bahwa jawaban responden Masyarakat Desa yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 responden atau 20%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 24 responden atau 55%, serta responden yang menjawab tidak terlaksana dengan rata-rata 11 responden atau 25%. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden Masyarakat Desa tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam kategori **“Cukup Terlaksana”**

Kategori cukup terlaksana ini memiliki arti bahwa Kepala Desa telah melakukan Fungsinya dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuannya sebagai Kepala Desa. Dimana dapat dilihat jawaban responden Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kubang Jaya jika diukur dengan indikator dari pembinaan yaitu memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan dan memberikan bimbingan didapatkan hasil dengan kategori Cukup Terlaksana dengan masih adanya ketidakikutsertaan masyarakat dalam kegiatan dan dalam rapat pembuatan program Pembinaan Kemasyarakatan menjadi masih adanya hambatan serta

beberapa program yang tidak berjalan seperti pemberian informasi dan keterangan bagaimana seharusnya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan.

Kepala Desa melakukan pengarahannya kepada pemerintah desa dan masyarakat sambil mengawasi kegiatan tersebut demi tercapainya kehidupan yang diharapkan dan kepala desa melakukan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa pembinaan kemasyarakatan sangat penting untuk dilakukan.

Kemudian agar suatu program yang telah dibuat dapat berjalan sesuai tujuan harusnya Kepala Desa lebih bersemangat dalam menggerakkan program pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya serta mengatur kegiatan mengenai Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya agar terpantau secara keseluruhan berjalan atau tidaknya kegiatan-kegiatan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari keseluruhan responden penelitian yaitu Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kubang Jaya, maka dilakukanlah rekapitulasi jawaban keseluruhan untuk mengetahui jawaban responden secara keseluruhan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.13 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyuluhan	23 (37%)	26 (41%)	14 (22%)	63 (100%)
2	Pengarahan	22 (35%)	33 (52%)	8 (13%)	63 (100%)
3	Bimbingan	24 (38%)	29 (46%)	10 (16%)	63 (100%)
Jumlah		69	88	32	189
Rata-Rata		23	29	11	63
Persentase		37%	46%	17%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel V.13 rekapitulasi diatas terlihat bahwa responden penelitian yang menjawab terlaksana rata-rata 23 responden atau dengan persentase 37%, selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana 29 responden atau persentase 46% , kemudian untuk responden yang menjawab tidak terlaksana dengan rata-rata 11 responden atau persentase 17%.

Maka dari itu tabel diatas dapat diketahui hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada dalam kategori **“Cukup Terlaksana”**

Cukup terlaksana ini berarti Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari melakukan penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kegiatan telah dilakukan dengan cukup terlaksana melihat dari jawaban dan tanggapan dari responden didapatkan hasil cukup terlaksana mengenai pembinaan yang dilakukan Kepala Desa pada saat rapat dan juga pertemuan dengan masyarakat akan tetapi dapat dilihat partisipasi masyarakat masih tergolong minim atau rendah. Dan seharusnya pada saat rapat diadakan kepala desa dapat memberikan informasi dan keterangan yang akurat tentang kegiatan pembinaan kemasyarakatan bagaimana kegiatan itu dapat berjalan, serta kepala desa seharusnya memberikan pengarahan yang jelas agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik sambil mengawasi kegiatan tersebut demi tercapainya tujuan.

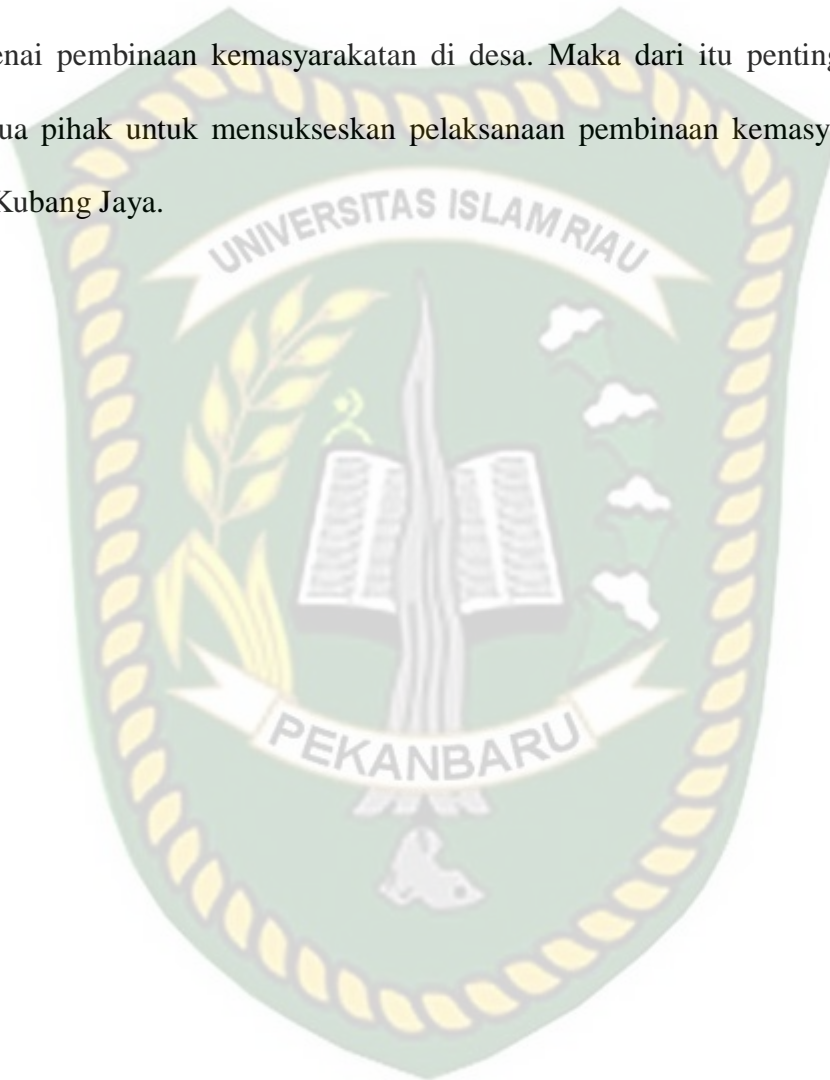
C. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Setelah melakukan penelitian, adapun hambatan yang diketahui dan terjadi meliputi:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Kubang Jaya saat kepala desa mengundang narasumber untuk memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan dan motivasi tentang pembinaan kemasyarakatan.
2. Pengarahan yang diberikan kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa dapat dikatakan masih sedikit atau jarang dilakukan. Sehingga membuat pembinaan terhadap kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya ini belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.
3. Dalam memberikan bimbingan yang menjadi hambatan kepala Desa Kubang Jaya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan kemasyarakatan di desa.
4. Tidak adanya kepala desa mensosialisasikan dan mengumumkan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Dari hambatan yang diketahui terlihat bahwa hal ini diakibatkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi kepala desa dan kurang melaksanakan tugasnya dalam pembinaan kemasyarakatan, seperti kurang maksimalnya penyuluhan, pengarahan maupun bimbingan yang diberikan kepada masyarakat sehingga

masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian hambatan yang datang dari masyarakat ialah kurangnya tingkat partisipasi dan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pembinaan kemasyarakatan di desa. Maka dari itu penting keaktifan dari dua pihak untuk mensukseskan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kubang Jaya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini dapat diambil kesimpulan dari masalah tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dari hasil Penelitian, Penilaian responden terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini terlihat dari pengumpulan data melalui Kuesioner rata-rata tanggapan responden yaitu sebanyak 29 responden atau 46% menjawab cukup terlaksana, ini menunjukkan bahwa indikator pembinaan yaitu penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan belum sepenuhnya Terlaksana.
2. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan Kepala Desa belum maksimal dikarenakan partisipasi masyarakat yang minim, hal ini juga diakibatkan oleh tidak adanya pengumuman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan yang ada Di Desa Kubang Jaya, kemudian masih banyaknya Aparatur Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

arahan yang diberikan Kepala Desa seperti melaksanakan kegiatan gotong royong, menjaga keamanan lingkungan yang seharusnya masing-masing RT melaksanakannya. Selanjutnya bimbingan yang lakukan oleh Kepala Desa seharusnya bisa menggerakkan kegiatan yang ada di Desa, tetapi dikarenakan kurangnya partisipasi dan tidak adanya Peraturan Desa untuk mengatur kegiatan yang ada sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik. Kemudian terlihat kurangnya perhatian Pemerintah Desa Kubang Jaya terhadap kegiatan yang ada di Desa sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dibuat tidak berjalan dengan baik.

3. Setelah dilakukan pengamatan salah satu kegiatan yang ada di Desa Kubang Jaya yakni Keamanan Lingkungan, Ketertiban Umum & Perlindungan Desa terlihat bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dilingkungan desa, dan seharusnya pemerintah desa dapat memberikan pembinaan secara rutin kepada RT/ RW yang ada di desa.
4. Dari hasil Analisis Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan dalam kategori “Cukup Terlaksana”

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yaitu:

1. Untuk Kepala Desa agar dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara melakukan pertemuan dengan masyarakat guna membahas kegiatan yang akan dilakukan, agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
2. Kepada Kepala Desa untuk dapat melakukan pengawasan atau pemantauan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, agar terlihat dimana kesalahan dan keterlambatan yang terjadi dari segi pembinaan kemasyarakatan agar bisa diperbaiki.
3. Kepada Kepala Desa untuk dapat mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, agar kegiatan yang dilaksanakan jauh lebih baik, dengan bantuan dan saran-saran dari masyarakat.
4. Kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah dibentuk agar usaha pembinaan yang dilakukan kepala desa bisa terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Abdullah, Rozali. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andrianto, Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: Manda Maju
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Athoillah, Anton. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia
- Denur. DJ. (2005). *Dasar Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Gaouzali, Saydam. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro)*. Jakarta: Djembatan
- Hasibuan, M. S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Ketujuh Belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. (2003). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurcholis, Hanif. (2011) *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nawawi, Hadari. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Nawawi, Ismail. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, Zaidan. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Pasalong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Penyusun, T. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Badan Penerbit Fisipol*. Pekanbaru: UIR .
- S. Haryono. (2012). *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YPKN
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik " Teori, Kebijakan,dan Implementasi"*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thoha, Miftah. (2003). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku,Struktur,Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumen

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang: *Pemerintahan Daerah*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang: *Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang: *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang: *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang: *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*